



**SALINAN**

**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertib diperlukan pedoman untuk proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

11. Badan.....

11. Badan Anggaran DPRD yang selanjutnya disebut Banggar adalah kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun APBD.

Pasal 2

- (1) Pedoman umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan pedoman dan kalender kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- (2) Pedoman umum penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun:
  - a. perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2019;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017; dan
  - c. perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. perencanaan dan penganggaran Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - c. perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR,  
ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : 21 TAHUN 2018  
 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN,  
 PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
I.	Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya	Paling lambat Minggu ke-1 bulan Februari 2018	Badan Keuangan Daerah (BKD)
II.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2019 dan Penyusunan Renja Perangkat Daerah			
1.	Persiapan Penyusunan RKPD 2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-3 sampai 4 Desember 2017	Baperlitbang & Perangkat Daerah
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD dan Rancangan Awal RKPD	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke-2 s/d minggu ke-4 bulan Januari 2018	Baperlitbang
3.	Konsultasi Publik tentang Rancangan Awal RKPD	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke -4 Januari 2018	Baperlitbang

4. Penyampaian...

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2019	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke-4 Januari 2018 - Minggu ke -1 Februari 2018	Baperlitbang
5.	Musrenbang Nagari Tahun 2018	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, RPJM Nagari, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-3 bulan Januari s/d minggu ke-2 bulan Februari 2018 (16 januari - 8 februari)	Dinas PMDPPKB
6.	Musrenbang Kecamatan Tahun 2018	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Nagari, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-4 bulan Februari s/d minggu ke-5 bulan Februari 2018	Baperlitbang

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
7.	Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-3 s/d Minggu ke-5 Februari 2018	Baperlitbang
8.	Forum Internal Perangkat Daerah Tahun 2018	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan Awal RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan	Minggu ke-4 bulan Februari 2018	Perangkat Daerah
9.	Forum Perangkat Daerah Tahun 2018	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan Awal RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan, Perda No. 5 Tahun 2010, Perbup No. 50 Tahun 2015	Minggu ke-2 bulan Maret 2018	Baperlitbang
10.	Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2019	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, Rancangan Awal RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah	Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 bulan Maret 2018	Baperlitbang

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
11.	Musrenbang Kabupaten Tahun 2018	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan, Hasil Forum Perangkat Daerah, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-3 bulan Maret 2018 (21-22 Maret 2018)	Baperlitbang
12.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, Rancangan RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Kabupaten	Minggu ke-4 bulan Maret 2018	Baperlitbang
13.	Review APIP	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017	Minggu ke-4 Maret 2018	Inspektorat
14.	Penyampaian Ranperbup tentang RKPD Tahun 2019 ke Gubernur untuk difasilitasi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015	Minggu ke-1 bulan April 2018	BAGIAN HUKUM SETDA

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
15.	Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-4 bulan Mei 2018	Baperlitbang
16.	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-1 bulan Juni 2018	PERANGKAT DAERAH
III.	Penyusunan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018			
1.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya	Paling lambat minggu ke-1 bulan Juni 2018	
2.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 oleh TAPD kepada Bupati	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya	Minggu ke-1 bulan Juni 2018	
3.	Review APIP	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2017	Minggu ke-1 Juni 2018	Inspektorat
4.	Penyampaian Rancangan KU-PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya	Minggu ke-2 bulan Juni 2018	
5.	Pembahasan Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya	Minggu ke-3 s/d minggu ke-4 bulan Juni 2018	
6.	Penetapan Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD Tahun 2019	Hasil Pembahasan TAPD dan Banggar DPRD	Paling lambat minggu ke-4 bulan Juli 2018	

IV. Penyusunan.....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
IV.	Penyusunan RKA- Perangkat Daerah Tahun 2019			
1.	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD dan penyampaian draf RKA SKPD/PPKD oleh SKPD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019	Minggu ke-4 bulan Juli 2018	BKD
2.	Penelitian dan Pembahasan RKA SKPD/PPKD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019, Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD	Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 bulan Agustus 2018	BKD
V.	Penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019			BKD
1.	Penyusunan Ranperda APBD TA 2019 dan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2019	Pedoman Penyusunan APBD TA 2019, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019	Minggu ke-4 bulan Agustus 2018	BKD
2.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 oleh PPKD kepada Bupati	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya	Minggu ke-2 bulan September 2018	BKD
3.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 dan Nota Keuangan oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-3 bulan September 2018	BKD
4.	Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Pedoman Penyusunan APBD TA 2019, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019	Minggu ke-2 bulan Oktober s/d minggu ke-1 bulan November 2018	BKD
5.	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD	Hasil Pembahasan Ranperda APBD antara TAPD dan Banggar DPRD	Minggu ke-2 bulan November 2018	BKD

6. Penyampaian...

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
6.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD TA 2018 untuk dievaluasi oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Minggu ke- 1 bulan Oktober 2018	BKD
7.	Penetapan hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2018 oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Minggu ke-3 bulan Oktober 2018	BKD
8.	Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD TA 2018 sesuai hasil evaluasi Gubernur	Hasil evaluasi Gubernur atas Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Minggu ke-4 bulan Oktober 2018	BKD
9.	Penetapan Ranperda Perubahan APBD TA 2018 menjadi Perda Perubahan APBD TA 2018 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2018 menjadi Perbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2018	Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD TA 2018 sesuai hasil evaluasi Gubernur	Minggu ke-4 bulan Oktober 2018	BKD

VI. Penetapan....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
VI.	Penetapan DPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019			
1.	Penyusunan DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2018	Surat Edaran Bupati tentang Penyampaian/ Penyusunan DPPA SKPD/PPKD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2017	Minggu ke-1 bulan November 2018	BKD
2.	Penelitian DPPA SKPD/PPKD oleh Tim Peneliti DPPA SKPD/PPKD	Surat Edaran tentang Penyusunan DPPA SKPD/PPKD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2018	Minggu ke-1 s/d ke 2 bulan November 2018	BKD
3.	Pengesahan DPPA SKPD/PPKD	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA SKPD/PPKD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2018, Perda Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2018	Minggu ke-2 bulan November 2018	BKD

VII. Penetapan...

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
VII.	Penetapan DPA Perangkat Daerah dan DPA PPKD Tahun Anggaran 2019			
1.	Penyusunan DPA Perangkat Daerah dan DPA PPKD	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA-Perangkat Daerah, DPA PPKD Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019	Paling lambat minggu ke-1 bulan Januari 2019	BKD
2.	Penelitian DPA-Perangkat Daerah dan DPA PPKD oleh Tim Peneliti DPA- Perangkat Daerah dan DPA PPKD	DPA- Perangkat Daerah, Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA-Perangkat Daerah, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2018, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2019	Minggu ke-2 s/d minggu ke-3 bulan Januari 2019	BKD
3.	Pengesahan DPA Perangkat Daerah	DPA- Perangkat Daerah, DPA PPKD KU PPAS APBD TA 2019, APBD TA 2019	Minggu ke-3 bulan Januari 2019	BKD

Keterangan:

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan/atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan RAPBD 2019.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,  
ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : 21 TAHUN 2018  
 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN,  
 PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya oleh PPKD kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah	Peraturan Daerah APBD TA 2017, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-2 bulan Juli 2018	BKD
2.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama disertai dengan Prognosis Untuk 6 (enam) bulan berikutnya oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya	Peraturan Daerah APBD TA 2017, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-3 bulan Juli 2018	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	Rekonsiliasi Laporan Keuangan TA 2017 antara Perangkat Daerah dengan PPKD	Peraturan Daerah APBD TA 2017, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 bulan Januari 2018	BKD
4.	Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2017 kepada Bupati melalui PPKD	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2017, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 bulan Februari 2018	BKD
5.	Review APIP	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang kebijakan pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri di Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2018	Minggu ke-3 Februari 2018	Inspektorat
6.	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017 oleh Bupati kepada BPK	Peraturan Daerah APBD TA 2016, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Tanggal 31 Maret 2018	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
7.	Pemeriksaan oleh Tim BPK	Peraturan Daerah APBD TA 2016, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-4 bulan Januari s/d minggu ke-2 bulan Mei 2017 <u>A. Pemeriksaan Pendahuluan :</u> Minggu ke 3 Januari s/d Minggu 3 bulan Februari. <u>B. Pemeriksaan Terinci :</u> Minggu ke 1 April s/d Minggu 2 bulan Mei.	
8.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017 oleh BPK	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2017, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 bulan Juni	BKD
9.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 (Nota Pertanggung jawaban Keuangan TA 2017) oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2017, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat minggu ke-2 bulan Juni	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
10.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 dengan DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat minggu ke-3 s/d minggu ke 4 bulan Juni 2018	BKD
11.	Pendapat Akhir DPRD dan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD TA 2017	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 bulan Juli 2018	BKD
12.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD TA 2017 oleh Gubernur	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-2 s/d minggu ke 4 bulan Juli	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
13.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD TA 2017.	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-1 bulan Agustus	BKD

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : 21 TAHUN 2018  
 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN,  
 PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
I.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018			
1.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Minggu ke-3 s/d ke-4 bulan Juli 2018	Baperlitbang
2.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 oleh TAPD kepada Bupati	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Minggu ke-1 bulan Agustus 2018	Baperlitbang

3. Penyampaian...

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Minggu ke-1 bulan Agustus 2018	Baperlitbang
4.	Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Pedoman penyusunan Perubahan APBD TA 2018	Minggu ke-2 bulan Agustus 2018	Baperlitbang
5.	Penetapan Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2018	Hasil Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2018	Minggu ke-2 bulan Agustus 2018	Baperlitbang
II.	Penyusunan RKA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019			
1.	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD dan penyampaian draf RKA SKPD/PPKD oleh SKPD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019	Minggu ke-4 bulan Juli 2018	BKD
2.	Penelitian dan Pembahasan RKA SKPD/PPKD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019, Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD	Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 bulan Agustus 2018	BKD

III. Penyusunan...

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
III.	Penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019			
1.	Penyusunan Ranperda APBD TA 2019 dan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2019	Pedoman Penyusunan APBD TA 2019, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019	Minggu ke-4 bulan Agustus 2018	BKD
2.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 oleh PPKD kepada Bupati	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya	Minggu ke-2 bulan September 2018	BKD
3.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 dan Nota Keuangan oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-3 bulan September 2018	BKD
4.	Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Pedoman Penyusunan APBD TA 2019, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019	Minggu ke-2 bulan Oktober s/d minggu ke-1 bulan November 2018	BKD
5.	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD	Hasil Pembahasan Ranperda APBD antara TAPD dan Banggar DPRD	Minggu ke-2 bulan November 2018	BKD
6.	Evaluasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD	Minggu ke-3 bulan November s/d minggu ke-1 bulan Desember 2018	BKD
7.	Penyempurnaan Ranperda APBD Tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur	Hasil Evaluasi Gubernur	Minggu ke-2 bulan Desember 2018	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
8.	Penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Perda APBD tahun Anggaran 2019 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran APBD Tahun 2019 menjadi Perbup Penjabaran APBD Tahun 2019	Pedoman Penyusunan APBD TA 2019, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019	Paling lambat minggu ke-3 bulan Desember 2018	BKD
IV.	Penetapan DPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019			
1.	Penyusunan DPA-SKPD dan DPA-PPKD	Surat Edaran Bupati tentang Penyampaian/ Penyusunan DPA-SKPD, DPA-PPKD Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019		Penyusunan DPA-SKPD dan DPA-PPKD
2.	Penelitian DPA-SKPD dan DPA-PPKD oleh Tim Peneliti DPA-SKPD dan DPA-PPKD	DPA SKPD/PPKD, Surat Edaran tentang Penyusunan DPA SKPD/PPKD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2019, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2019		Penelitian DPA-SKPD dan DPA-PPKD oleh Tim Peneliti DPA-SKPD dan DPA-PPKD
3.	Pengesahan DPA SKPD/PPKD	DPA SKPD/PPKD, KU PPAS APBD TA 2019, APBD TA 2019		Pengesahan DPA SKPD/PPKD

Keterangan...

Keterangan:

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002